

Diplomasi Vaksin Republik Rakyat Tiongkok di Asia Tenggara

Mutiara Ageng

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

150910101032@mail.unej.ac.id

Abstract

At the end of 2019, the emergence of a virus outbreak that in a short time became a pandemic has become a threat to the world, this outbreak has forced many aspects of life and the world's systematics to change as well. This virus is named Coronavirus Disease-19 which is abbreviated as COVID-19. Meanwhile, after the emergence of the COVID-19 pandemic, China faced 'xenophobia' and racism from many parties regarding the first case of COVID-19 appearing in Wuhan City, Hubei Province in China, no exception even from Southeast Asian nations. This paper will discuss the goals of the People's Republic of China in carrying out Vaccine Diplomacy in the Southeast Asian Region. With the decline of China's image, xenophobia and racism have emerged, China has taken the initiative to carry out diplomacy to improve its image. In the current era of the COVID-19 pandemic, a new term has developed called Vaccine Diplomacy which in the implementation of Diplomacy of a vaccine country is used as a medium for its approach.

Keywords: COVID-19, Vaccine Diplomacy, xenophobia, Nation Branding

1. Pendahuluan

Sejak awal tahun 2020 lalu, dunia telah dipaksa berubah oleh keadaan. Menyeruaknya sebuah wabah virus yang dalam waktu singkat berubah menjadi skala pandemi telah menjadi ancaman bagi seluruh dunia, wabah ini telah memaksa banyak aspek kehidupan dan sistematisa dunia berubah pula. Kemunculan virus ini membawa dampak besar hingga dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan secara global, mulai dari hal paling sederhana seperti sulitnya bertemu secara langsung dengan orang-orang yang kita kenal, menjaga jarak di tempat umum, sekolah-sekolah dilakukan secara daring hingga ke bisnis-bisnis yang beralih ke media daring, sulitnya proses ekspor-impor, dan bahkan kegiatan resmi kenegaraan di kancah internasional. *World Health Organization* (untuk selanjutnya disebut *WHO*) menamakan virus ini dengan nama *Coronavirus Disease-19* atau secara singkat disebut dengan *COVID-19* dimana sejak bulan Maret Tahun 2020 dinyatakan sebagai Pandemi yang dapat menular pada setiap manusia di setiap negara (*WHO*, 2020). Berdasarkan situs *Promed Mail* (2019), kemunculan *COVID-19* pada awalnya diduga merupakan wabah *Pneumonia* yang muncul di Kota Wuhan, Tiongkok, dan cukup mengejutkan masyarakat karena menyebabkan kematian mendadak beberapa orang di kota itu. Setelah diamati dan diteliti, orang-orang itu telah memiliki gejala *Pneumonia* yang sudah berlalu beberapa hari hingga pada puncaknya mengakibatkan kesulitan bernafas akut hingga berujung kematian. Dilansir dari sebuah berita unggahan *British Broadcasting Corporation*, Pemerintah Tiongkok dengan sigap

memberlakukan *lockdown* di Provinsi Hubei setelah menyadari bahayanya virus yang diperkirakan pertama kali muncul di Wuhan, ibukota Provinsi Hubei (BBC, 2020).

Kondisi saat ini yang mana pandemi sedang menyerang dunia tak hanya berdampak pada fungsi mikro dalam hal kesehatan atau sosial di tingkat masyarakat namun juga secara makro seperti dalam tingkat perdagangan dan kerjasama serta sistem-sistem hubungan antar negara yang terhambat akibat pembatasan pertemuan dalam skala besar guna mengurangi penyebaran virus *COVID-19*. Kondisi tersebut menyebabkan proses hubungan antar negara kian melambat dan juga mendorong setiap negara untuk menerapkan sistem, tujuan dan pola kinerja dalam hubungan lintas batas negara yang semakin tertutup. Hal ini dikarenakan setiap negara harus menutup jalur masuk dan keluar terhadap siapa saja yang ingin berkunjung baik untuk liburan maupun kepentingan diplomasi agar penyebaran *COVID-19* tidak terjadi.

Munculnya *COVID-19* juga memicu munculnya sikap *xenophobia* dan rasisme terhadap Tiongkok. Sikap tersebut muncul dikarenakan Tiongkok merupakan lokasi ditemukannya korban pertama *COVID-19* dan dianggap sebagai penyebab *COVID-19* menyebar hingga menjadi pandemi. Pernyataan ini dikemukakan oleh Presiden Trump yang tidak hanya menyalahkan Tiongkok atas munculnya *COVID-19* saja namun juga turut memberi julukan-julukan yang memicu munculnya sikap *xenophobia* dan rasisme terhadap negara Tiongkok, etnisnya dan juga keturunan Asia-Amerika (Tyler T. Reny dan Matt A. Barreto, 2020). Kemunculan sikap-sikap *xenophobia* dan rasisme terhadap Tiongkok ini membuat banyak pihak menempatkan kesalahan pada Tiongkok.

Mayoritas negara-negara di dunia melakukan *lockdown* untuk mencegah pandemik menyebar luas. Seperti yang disampaikan Rehia Sebayang (2020) dalam situs *cnbcindonesia.com*, Tiongkok melakukan *lockdown* di awal kemunculan *COVID-19* di 16 kota di sekitar Provinsi Hubei termasuk Wuhan, kota tempat *COVID-19* pertama muncul, dan di akhir tahun 2021 lalu Tiongkok kembali melakukan *lockdown* di Xi'an guna mencegah penyebaran *COVID-19* jenis *Omicron* yang dilansir dari situs *cnbc.com* oleh Evelyn Cheng (2021). Datangnya pandemi *COVID-19* yang meningkatkan kecemasan dan kewaspadaan semua individu dalam aspek kesehatan ini juga mendorong beberapa aktor menggunakan celah aspek kesehatan ini untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya, dan hal inilah yang pengamat politik sebut dengan istilah Diplomasi Vaksin, diplomasi yang menggunakan vaksin sebagai media pendekatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam dokumen *FAQ* Seputar Vaksinasi *COVID-19* (*FAQ* adalah *Frequently Asked Question*, pertanyaan yang akhir-akhir ini ditanyakan) melalui situs *kesmas.kemkes.go.id*, mendefinisikan vaksin sebagai proses di dalam tubuh saat seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Apabila dijelaskan dengan kalimat yang lebih mudah, vaksin merupakan versi lemah dari sebuah virus yang diolah dari salah satu bagian virus itu sendiri yang ditujukan untuk diperkenalkan kepada tubuh untuk meningkatkan kewaspadaan sistem imun tubuh apabila virus yang menjadi wabah itu masuk ke dalam tubuh. Anggapan bahwa vaksin merupakan obat atau jawaban kesembuhan dari sebuah wabah adalah salah, dikarenakan sebenarnya kita disuntikkan virus dengan bentuk

jauh lebih lemah dibandingkan virus sebenarnya, hanya untuk memancing tubuh meningkatkan sistem imun yang lebih kuat. Menurut situs *COVID-19 Vaccine Tracker*, beberapa vaksin produksi Tiongkok telah mendapat pengakuan penggunaan dan masuk ke dalam *Emergency Use Listing* (Daftar Penggunaan Darurat, selanjutnya disebut *EUL*) oleh *World Health Organization* (Organisasi Kesehatan Dunia, selanjutnya disebut sebagai *WHO*). Setelah sebagian dari vaksin yang diteliti dan dikembangkan oleh Tiongkok diakui *WHO* dan masuk kedalam daftar *EUL*, Tiongkok kembali menjalin pendekatan lintas batas menggunakan vaksin *COVID-19* sebagai media.

Sebuah hubungan yang menjadi perhatian pengamat adalah hubungan antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN yang tak lain merupakan rekan kerja sama Tiongkok terhubung dalam sebuah kerja sama regional berbasis ekonomi yaitu *ACFTA* (*ASEAN-China Free Trade Area*, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China yang selanjutnya disebut *ACFTA*). Tiongkok dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Awal mula hubungan dialog ASEAN-Tiongkok adalah saat Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Qian Qichen menghadiri sesi pembukaan *The 24th ASEAN Ministerial Meeting* (Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-24) pada Juli 1991 di Kuala Lumpur sebagai tamu dari Pemerintah Malaysia. Beliau menyampaikan minat Tiongkok untuk bekerja sama dengan ASEAN dengan tujuan saling menguntungkan yang selanjutnya pihak ASEAN memberikan status 'mitra dialog' penuh terhadap Tiongkok di AMM ke-29 pada Juli 1996 di Jakarta, Indonesia (ASEAN, t.t.).

Sikap Tiongkok yang bergerak cepat menangani wabah yang menyerang negaranya dengan menyusun sistem sosial serta kesehatan secara sistematis dan segera memulai penelitian vaksin hingga memberi hasil sebuah vaksin paten dalam waktu singkat yang kemudian didistribusikan secara komersial dan juga dalam bentuk donasi telah menangkap semua mata internasional tertuju pada setiap langkah Negeri Pagar Bambu itu. Langkah Tiongkok dalam memasok vaksinnya ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga menjadi bahan diskusi oleh pengamat internasional yang kini populer dengan istilah Diplomasi Vaksin. Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, peneliti tertarik untuk menganalisa tujuan dari Diplomasi Vaksin yang dilakukan oleh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Apakah motif Tiongkok dalam melakukan Diplomasi Vaksin di Kawasan Asia Tenggara?”**

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Diplomasi Vaksin yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Kawasan Asia Tenggara. Penulis menggunakan Teori Diplomasi dan konsep *Nation Branding*. Teori Diplomasi digunakan untuk menjelaskan kegiatan distribusi vaksin oleh Tiongkok ke Asia Tenggara di era pandemi COVID-19 dan konsep *Nation Branding* digunakan untuk menganalisis kegiatan tersebut.

Teori Diplomasi

Power erat berkaitan dengan Hubungan Internasional. Menurut Spykman (1942), *power* adalah “*the real governing force in international relations*” Ernest J. Wilson (2008) mengemukakan bahwa terdapat 3 jenis *power*, yaitu *hard power*, *soft power* dan *smart power*. Selanjutnya, Wilson menjabarkan bahwa *soft power* didefinisikan sebagai hubungan lintas negara diberbagai aspek dalam bentuk pertemuan dan perundingan guna menyamaratakan kepentingan setiap pihak dengan

mengurangi risiko setiap pihak dengan tujuan menciptakan dunia yang lebih baik. Menurut C. W. Freeman and Sally Marks (2020) dalam situs *Britannica*, diplomasi berasal dari Bahasa Perancis yang juga memiliki akar bahasa dari Bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata ‘*diplo*’ dan ‘*ma*’. Kata ‘*diplo*’ memiliki arti ‘terlipat menjadi dua’ dan ‘*ma*’ memiliki arti yang merujuk pada benda yang berkaitan dengan kertas atau dapat diartikan sebagai ‘dokumen’ Menurut kbbi.web.id diplomasi termasuk ke dalam jenis kata ragam cakapan yang memiliki definisi sebagai...

“...kecakapan menggunakan pilihan kata yang tepat bagi keuntungan pihak yang bersangkutan (dalam perundingan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan sebagainya).”

Dalam buku *International Relations*, Stephen McGlinchey (2017, hal. 20-31) berpendapat bahwa diplomasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses hubungan antar aktor-aktor, misal diplomat, yang pada umumnya mewakili sebuah negara serta terhubung dalam sistem internasional dan saling terlibat dalam dialog privat dan umum (diplomasi) untuk mencapai keinginannya dengan cara damai.

Dalam *Culture of Peace Online Journal*, Jeffrey Mapendere (2021) menyatakan bahwa diplomasi adalah sebuah jalan guna menyelesaikan konflik antar negara dengan *soft power* dan kompleksitas konflik intranegara dan antarnegara telah menjadi tantangan kritis di lapangan dan metode penyelesaian konflik. Selanjutnya, Mapendere menyebutkan bahwa dalam upaya menemukan metode terbaik untuk menyelesaikan konflik, berbagai jenis diplomasi telah diidentifikasi. Terdapat beberapa *track* (istilah jenis diplomasi) dalam diplomasi secara umum yang disebutkan oleh Mapendere yaitu *Track One Diplomacy* dan *Track Two Diplomacy*, dan istilah *track* baru juga diulas oleh Mapendere dalam jurnalnya, yaitu *Track One and a Half Diplomacy*.

- ***Track One Diplomacy***

Ciri terpenting yang membedakan *Track One Diplomacy* atau yang dikenal juga dengan istilah *Official Diplomacy* dari semua bentuk diplomasi lainnya adalah penerapan formalnya di tingkat antar negara. *Track One Diplomacy* biasanya dianggap sebagai alat perdamaian utama dari kebijakan luar negeri suatu negara dan diplomasi ini dilakukan oleh diplomat, pejabat tinggi pemerintah, serta kepala negara dan ditujukan untuk mempengaruhi struktur kekuasaan politik.

- ***Track Two Diplomacy***

Dalam *Culture of Peace Online Journal*, Mapendere mengutip pernyataan Montville (1991) yang mendefinisikan *Track Two Diplomacy* sebagai, "interaksi informal tidak resmi antara anggota dari sebuah kelompok atau negara musuh yang bertujuan untuk mengembangkan strategi, untuk mempengaruhi opini publik, mengatur sumber daya manusia dan material dengan cara yang dapat membantu menyelesaikan konflik mereka". Montville juga menekankan bahwa *Track Two Diplomacy* bukanlah pengganti *Track One Diplomacy*, tetapi mengimbangi kendala yang dikenakan pada para pemimpin oleh harapan psikologis orang-orang mereka.

- ***Track One and a Half Diplomacy***

Mapendere mengutip pada Mapendere (2000) yang mendefinisikan *Track One and a Half Diplomacy* sebagai sebuah interaksi publik atau pribadi antara perwakilan resmi dari pemerintah yang berkonflik atau entitas politik yang difasilitasi atau dimediasi oleh pihak ketiga yang tidak mewakili organisasi atau institusi politik. Mapendere menambahkan, ciri utama yang membedakan *Track*

One and a Half Diplomacy dari *Track Two Diplomacy* adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses. Dalam *Track Two Diplomacy*, pihak-pihak yang terlibat dalam proses resolusi konflik bukanlah perwakilan resmi dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan warga negara yang berpengaruh. Sementara dalam *Track One and a Half Diplomacy*, pihak-pihak yang terlibat dalam proses resolusi konflik adalah perwakilan resmi dari kelompok yang berkonflik, namun difasilitasi dan dimediasi oleh pihak non-politik.

Salah satu bentuk diplomasi adalah Diplomasi Publik, Malone (1985, hal. 199) menjabarkan secara ringkas bahwa diplomasi publik dapat didefinisikan sebagai sebuah komunikasi langsung dengan pihak asing dengan membawa tujuan untuk dapat mempengaruhi pola pikir pihak lawan dan tentunya pola pikir negara pihak lawan.

Eytan Gilboa (2008, hal. 57) menambahkan dalam artikelnya bahwa dalam definisi yang dijabarkan Malone tersebut tidak dijelaskan subjek yang mengendalikan komunikasi tersebut, mungkin hal itu disebabkan oleh gagasan yang dipegang secara luas pada tahun 1980-an karena pada masa itu hanya pemerintahan saja yang menerapkan diplomasi publik. Definisi tersebut juga menyarankan sebuah tahap proses mempengaruhi yang terdiri atas dua tahap, yaitu: 1.) komunikasi langsung yang dirancang guna membangun opini publik yang memiliki sifat dukungan di pihak negara lain, dan 2.) tekanan dari publik (yang telah mendapatkan informasi) terhadap pemerintah untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap negara lain yang menggunakan diplomasi publik. Diplomasi publik juga dapat dijelaskan sebagai :

“...a government’s process of communication with foreign publics in an attempt to bring about understanding for its nation’s ideas and ideals, its institutions and culture, as well as its national goals and policies.” (Tuch, 1990, hal. 229)

Pada penjelasan diatas Tuch menjelaskan bahwa diplomasi publik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses kegiatan sebuah pemerintahan dengan masyarakat asing yang bermaksud membawa juga menyampaikan ide-ide dan prinsip negaranya, institusi dan budayanya, disertai juga dengan tujuan-tujuannya dan kebijakan-kebijakannya. Di sisi lain Frederick (1994, hal. 229) menjelaskan definisi diplomasi publik dengan menambahkan sedikit detail, yaitu bahwa diplomasi publik adalah sebuah kegiatan yang ditujukan ke luar negeri dalam bidang informasi, edukasi dan budaya yang bertujuan mempengaruhi pemerintah pihak negara lain dengan mempengaruhi masyarakatnya.

Konsep *Nation Branding*

M Soni (2019) menyatakan dalam artikelnya di situs *brandfinance.com* bahwa *nation branding* merupakan cara sebuah negara atau instansi dalam memosisikan dan mempromosikan dirinya sebagai wadah bagi orang untuk mengunjungi, berinvestasi, dan membangun reputasi yang baik untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa juga bakat atau kelebihan yang dimiliki.

Menurut Anholt (2003), *nation branding* merupakan cara membentuk persepsi terhadap suatu target kelompok masyarakat tertentu melalui 6 (enam) aspek berikut ini: pariwisata, ekspor, masyarakat, pemerintahan, kebudayaan dan warisan budaya, juga investasi dan imigrasi. Selanjutnya Anholt menjelaskan bahwa beliau juga tidak yakin sepenuhnya memahami arti dari ‘*branding*’. Menurut pendapat Anholt, arti kata ‘*brand*’ dapat memiliki tiga arti yang berbeda dalam dunia perdagangan.

Pertama, arti kata *'brand'* dapat ditujukan pada identitas rancangan produk seperti dari tampilan produk, kemasannya, keseragamannya, komunikasi yang disampaikan melalui produk itu sendiri dan lainnya. Kedua, kata *'brand'* terkadang juga digunakan untuk menggambarkan budaya yang dimiliki perusahaan atau organisasi di balik produk yang dihasilkan. Ketiga, *'brand'* juga dapat ditujukan kepada reputasi produk serta perusahaan yang dilihat dari sudut pandang target konsumen.

Sebelum melihat secara rinci konsep dari memperlakukan sebuah bangsa (*nation*) sebagai sebuah merek (*brand*), ada baiknya melihat dari beberapa definisi tentang apa yang dimaksud dengan *'brand'*. Macrae, Parkinson dan Shermard (1995, sebagaimana dikutip dalam Keith Dinnie, 2008, hal 4) mendefinisikan *brand* sebagai:

"...a brand represents a unique combination of characteristic and added values, both functional and non-functional, which have taken on a relevant meaning that is inextricably linked to a brand, awareness of which might be conscious or intuitive."

Kutipan di atas menjelaskan bahwa sebuah *'brand'* atau merek adalah merepresentasikan kombinasi unik dari karakteristik dan nilai tambahan secara fungsional atau non-fungsional yang memiliki arti yang relevan dengan merek (yang dimaksud), kesadaran (akan arti itu) yang mungkin disadari atau bersifat intuitif. Dari penjelasan pengertian *'brand'* oleh para ahli di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *'brand'* merupakan tampilan atau gambaran yang ditunjukkan suatu pihak guna memberikan kesan terhadap pihak yang ditargetkan atau guna meningkatkan reputasi produk/jasa yang ditawarkan atau nilai suatu lembaga, seperti organisasi atau negara. Dinnie (2008, hal. 13) dalam Arus Reka Prasetya (2015) mendefinisikan *'nation branding'* sebagai "sekumpulan teori dan penerapannya yang bertujuan untuk mengukur, membangun, dan mengatur reputasi dari suatu negara (masih berhubungan dengan *place branding*)."

Dari penjabaran ahli terkait *'nation branding'* dan *'brand'* di atas, penulis menyimpulkan bahwa *'nation branding'* adalah cara membentuk persepsi terhadap suatu target kelompok masyarakat yang dilakukan sebuah negara atau instansi dalam memposisikan dan mempromosikan dirinya sebagai wadah bagi orang untuk mengunjungi, berinvestasi, dan membangun reputasi yang baik untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa juga bakat atau kelebihan yang dimiliki serta bertujuan untuk bertujuan untuk mengukur, membangun, dan mengatur reputasi dari suatu negara. *'Nation branding'* juga merupakan instrumen pendukung dalam analisis Diplomasi Publik.

2. Metodologi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif.

3. Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Hubungan ASEAN dan Tiongkok

Tiongkok dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhubung dalam sebuah kerja sama regional berbasis ekonomi yaitu *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok). Awal mula hubungan dialog ASEAN dan Tiongkok adalah saat Menteri Luar Negeri Republik Rakyat

Tiongkok Qian Qichen menghadiri sesi pembukaan *The 24th ASEAN Ministerial Meeting* (AMM, Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-24) pada Juli 1991 di Kuala Lumpur sebagai tamu dari Pemerintah Malaysia. Beliau menyampaikan minat Tiongkok untuk bekerja sama dengan ASEAN dengan tujuan saling menguntungkan, pada tahun itu Tiongkok telah dianggap sebagai 'mitra dialog'. Selanjutnya, pihak ASEAN resmi memberikan status 'mitra dialog' penuh terhadap Tiongkok di AMM ke-29 pada Juli 1996 di Jakarta, Indonesia (ASEAN, t.t.).

Dalam situs resminya, ASEAN (t.t.) mempublikasikan artikel yang menuliskan terkait *Priority Areas of Cooperation* (bidang kerjasama prioritas) dalam kerja sama antara ASEAN dan Tiongkok dalam *ASEAN-China Free Trade Area* yang selanjutnya disebut *ACFTA* (atau *CAFTA* dalam sudut pandang Tiongkok). Penandatanganan *Frame-work Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* pada tahun 2002 menjadi titik awal dimulainya kerja sama *ACFTA*, diikuti oleh perjanjian *ASEAN-China Trade in Goods Agreement* pada tahun 2004, *ASEAN-China Agreement on Trade in Services* pada tahun 2007, dan *ASEAN-China Investment Agreement* pada tahun 2009. *Framework Agreement* mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2003 dan mendapatkan beberapa kali perubahan pada tahun 2003, 2006, 2012, dan 2015. Perjanjian *Framework Agreement ASEAN-Tiongkok* juga menjalankan *Early Harvest Programme* yang diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2004, program ini memantau penghapusan *tariff lines* (produk dalam daftar harga/tarif) di beberapa produk pertanian untuk semua pihak dalam FTA. Sejak mulai diberlakukan pada tahun 2005, *Trade in Goods Agreement ASEAN-China* telah direvisi untuk memasukkan, antara lain, ketentuan tentang tindakan TBT (hambatan teknis perdagangan) dan SPS (sanitari dan fitosanitari). Dalam hal akses pasar, penghapusan tarif kini telah diselesaikan lebih dari 91,9% dari total *tariff lines* untuk ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand serta Vietnam) dan China. Sedangkan untuk negara-negara anggota ASEAN lainnya, penghapusan tarifnya sedang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam perjanjian.

Perjanjian ASEAN-China tentang *Trade in Services* ditandatangani pada tahun 2007, yang selanjutnya dilaksanakannya sebuah protokol yang masih berada di bawah naungannya yaitu '*Protocol to Implement the Second Package of Specific Commitments*' yang resmi ditandatangani pada tahun 2011. ASEAN dan Tiongkok juga menandatangani *Agreement on Investment* pada tahun 2009. Sepuluh tahun setelah *Framework Agreement* dilaksanakan, pada tahun 2013, kesepakatan untuk meningkatkan *ACFTA* pun diresmikan. Pemimpin negara-negara anggota *ACFTA* menyambut baik inisiatif untuk meningkatkan *ACFTA*, antara lain melalui memperbaiki kondisi pasar dan keseimbangan perdagangan antara kedua belah pihak, juga memperluas cakupan *Framework Agreement*. Pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur di sela-sela berlangsungnya KTT ASEAN ke-27 dan konferensi terkait, Protokol Peningkatan *ACFTA* secara resmi ditandatangani pemimpin negara-negara anggota *ACFTA* (protokol asli: *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements thereunder between ASEAN and the People's Republic of China*). (ASEAN, t.t.)

Protokol Peningkatan *ACFTA* mulai dilaksanakan sejak 1 Juli 2016. Protokol ini memberikan amandemen terhadap teks dalam bab *Rules of Origin (ROO)*, mekanisme yang digunakan untuk menentukan asal barang dalam rangka mendapatkan fasilitas tarif preferensi) dan memasukkan bagian tentang Prosedur

Kepabeanaan dan Fasilitasi Perdagangan pada *Trade in Goods Agreement ASEAN-China*. Protokol ini menyertakan *Third Package of Specific Commitments* yang masih bernaung dibawah perjanjian *Agreement on Trade in Service*, menambahkan ketentuan tentang promosi dan fasilitasi investasi dalam Perjanjian Investasi, dan memperkenalkan aturan tambahan dan area cakupan untuk Kerjasama Ekonomi dan Teknis di bawah *Framework Agreement*. Protokol juga menyediakan program kerja di masa depan untuk elemen yang belum selesai, yaitu pada liberalisasi lebih lanjut perdagangan barang, peninjauan aturan khusus produk, dan promosi dan perlindungan investasi. Protokol Peningkatan *ACFTA* diimplementasikan sepenuhnya dengan implementasi Peraturan Asal *ACFTA* yang direvisi berdasarkan Protokol pada Agustus 2019. Kerja sama ekonomi disematkan dalam berbagai ketentuan di bawah *ACFTA Framework Agreement*. Selanjutnya, sebagai bagian dari peningkatan, para pihak sepakat untuk memiliki Bab mandiri tentang Kerjasama Ekonomi dan Teknis di bawah Protokol untuk mengubah *Frame Agreement ACFTA* dan perjanjian terkait. (ASEAN, t.t.)

Sejak Tiongkok secara resmi menjadi ‘mitra dialog’ pada 1996, hubungan ASEAN dan Tiongkok telah terhubung selama 26 tahun. Namun tahun lalu, ASEAN dan Tiongkok mengadakan pertemuan KTT dengan judul “*ASEAN-China Special Summit to Commemorate the 30th Anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations*” untuk memperingati hubungan dialog antara kedua kawasan tersebut dengan tema bahasan ‘Kemitraan Strategis Komprehensif untuk Perdamaian, Keamanan, Kemakmuran, dan Pembangunan Berkelanjutan’ yang dilaksanakan pada 22 November 2021.

Kemunculan COVID-19

Pada akhir Desember 2019, wabah pneumonia aneh yang memiliki gejala seperti demam, batuk kering, dan kelelahan, dan terkadang gejala gastrointestinal muncul di Pasar Grosir Makanan Laut Huanan, di Wuhan, Hubei, Tiongkok. Wabah awal dilaporkan di pasar pada Desember 2019 dan melibatkan sekitar 66% staf di pasar itu. Pasar ditutup pada 1 Januari 2020, setelah pengumuman peringatan epidemiologis oleh otoritas kesehatan setempat pada 31 Desember 2019. Namun, pada bulan berikutnya (Januari) ribuan orang di Tiongkok, termasuk banyak provinsi (seperti Hubei, Zhejiang, Guangdong, Henan, Hunan, dll) dan kota-kota (Beijing dan Shanghai) diserang oleh penyebaran penyakit yang merajalela. Selanjutnya terdapat informasi bahwa penyakit ini turut menyebar ke negara lain, seperti Thailand, Jepang, Republik Korea, Vietnam, Jerman, Amerika Serikat, dan Singapura. Patogen wabah kemudian diidentifikasi sebagai virus beta-corona baru, bernama 2019 novel *coronavirus (2019-nCoV)* dan mengingatkan kita pada ingatan mengerikan tentang sindrom pernapasan akut yang parah (*SARS-2003*, yang disebabkan oleh beta-coronavirus lain) yang terjadi 17 tahun yang lalu. (Wu, dkk., 2020)

Yen-der Li dkk menjelaskan bahwa *Coronavirus (CoVs)* itu sendiri adalah sekelompok virus terkait yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari gejala ringan hingga hasil yang mematikan. Hingga saat ini, terdapat tujuh genera *CoV* yang diketahui menginfeksi manusia. Empat dari genus virus ini, termasuk *Human Coronavirus 229E (HCoV-229E)*, *Human Coronavirus OC43 (HCoV-OC43)*, *Human Coronavirus NL63 (HCoV-NL63)*, dan *Human Coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1)*, hanya menyebabkan gejala pernapasan yang relatif ringan. Atau tiga *CoV* lainnya, yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome*

Coronavirus (SARS-CoV), Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), dan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), sangat patogen dan dapat menyebabkan penyakit pernapasan yang parah dan hasil yang fatal pada pasien yang terinfeksi.

Virus corona mematikan pertama *SARS-CoV* muncul pada 2002 di Provinsi Guangdong, China. Selama wabah 2002-2004, *SARS-CoV* telah menginfeksi 8.098 orang dan mengakibatkan 774 kematian terkait *SARS* (~ 10% tingkat kematian) di 29 negara sebelum menghilang. Pada 2012, *MERS-CoV* muncul di Arab Saudi. Ini menyebabkan dua wabah di Korea Selatan pada tahun 2015 dan di Arab Saudi pada tahun 2018, dan masih memiliki laporan kasus sporadis saat ini. Pada Januari 2020, ada 2.519 kasus *MERS* yang dikonfirmasi dan 866 kematian (~ 35% angka kematian) di 27 negara. Pada Desember 2019, jenis baru *CoV* yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan parah muncul di Wuhan, China. Organisasi Kesehatan Dunia menamai virus baru ini *SARS-CoV-2* dan penyakitnya *COVID-19*, atau Penyakit Coronavirus 2019. Manifestasi klinis *COVID-19* dapat bervariasi dari gejala seperti flu tanpa gejala dan ringan hingga sindrom gangguan pernapasan akut dan kematian. Komplikasi paru, kardiologis, dan neurologis jangka panjang juga telah dilaporkan pada kasus *COVID-19*. Dibandingkan dengan *SARS-CoV* dan *MERS-CoV*, *SARS-CoV-2* sangat menular dengan perkiraan jumlah reproduksi 2,2 (satu kasus *COVID-19* yang ada dapat menyebabkan rata-rata 2,2 infeksi baru). Selain itu, kemampuannya untuk menyebar melalui pasien tanpa gejala telah menimbulkan tantangan besar untuk tindakan penahanan. Pada Oktober 2020, *SARS-CoV-2* telah menginfeksi lebih dari 43 juta orang dan mengakibatkan sekitar 1,15 juta kematian (~ 3% tingkat kematian) di 235 negara, wilayah, atau wilayah di seluruh dunia. Tak perlu dikatakan, *COVID-19* telah menjadi krisis kesehatan masyarakat paling serius dari generasi kita dan memiliki dampak besar pada ekonomi global dan geopolitik. Meskipun pemahaman kita tentang *CoV* patogen telah terus terakumulasi selama sekitar dua dekade, belum ada vaksin yang efektif yang disetujui untuk pencegahan infeksi *CoV* pada manusia. Mengingat cepatnya penyebaran dan tingginya angka kematian *COVID-19*, vaksin yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi ini. (Yen-Der Li, dkk., 2020)

Xenophobia dan Rasisme Pasca Munculnya COVID-19

Citra negara Tiongkok di mata negara-negara di kawasan Asia Tenggara menurun semenjak datangnya pandemi *COVID-19* yang kasus pertamanya muncul dari negaranya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Kemunculan virus ini memicu beberapa pihak menunjukkan sikap *xenophobia* dan rasisme atau kebencian terhadap etnis Tionghoa, *Asian Hate Crime* (Kejahatan Anti-Asia). Berdasarkan situs Merriam-Webster, kata '*xenophobia*' memiliki arti yaitu '*fear or hatred of strangers or foreigners*' yang dapat dijabarkan sebagai rasa takut atau rasa benci suatu kelompok terhadap orang asing. Kata '*xenophobia*' pertama kali muncul mendekati akhir dari abad ke-19, kutipan paling awal yang dimiliki situs Merriam-Webster adalah pada tahun 1880:

“Here, however, as in other cases, we are inclined to think that intelligent xenomania is decidedly preferable to the Xenophobia which is of necessity and always unintelligent. —The Daily News (London, England), 12 April 1880.”
(Merriam-Webster, t.t.)

Dalam artikel yang dikutip Merriam-Webster diatas berarti ‘...seperti dalam kasus lain, kita cenderung berpikir bahwa *xenomania* yang cerdas jelas lebih disukai daripada *xenophobia* yang merupakan kebutuhan dan selalu tidak cerdas’, yang diartikan menurut Daily News bahwa *xenomania* lebih baik dari *xenophobia*. Menurut KBBI Daring, arti kata ‘*xenomania*’ adalah sebuah rasa kesukaan yang berlebih terhadap hal-hal atau sesuatu yang asing, dan menurut *Daily News* bahwa kesukaan berlebih pada sesuatu itu lebih baik dan lebih rasional karena memiliki alasan mengapa menyukai hal tersebut dibandingkan dengan rasa takut atau benci terhadap sesuatu yang pada dasarnya memiliki alasan tidak jelas terhadap hal itu yang disebut ‘*unintelligent*’ atau tidak cerdas. Istilah ‘*xenophobia*’ memang muncul sekitar tahun 1880-an seperti yang dilansir Merriam-Webster, namun bukan berarti sikap itu tidak ada sebelumnya. Sikap ini sudah ada jauh sebelum istilah itu dipublikasikan dan baru resmi disebut dengan istilah ‘*xenophobia*’ pada akhir abad ke-19. *Xenophobia* terhadap ras oriental dan *Asian-Hate Crime* (Kejahatan Benci-Asia) telah ada sebelumnya, namun munculnya *COVID-19* seakan memberi bumbu lebih terhadap kejahatan *xenophobia* dan *Asian-Hate Crime* (Kejahatan Benci-Asia) di lingkungan global.

Dalam kasus *COVID-19* ini, beberapa kelompok mengalami peningkatan rasa ‘takut’ akan ras Tionghoa dan keturunannya dikarenakan kasus *COVID-19* pertama muncul di Tiongkok. Hal itu menyebabkan beberapa kelompok ini takut tertular penyakit yang merenggut jutaan nyawa itu juga meletakkan kebencian pada ras Tionghoa dan keturunannya untuk kemudian menjauhi atau mengucilkan ras Tionghoa dan keturunannya..

Dalam jurnal ‘*Xenophobia in the time of pandemic: othering, anti-Asian attitudes, and COVID-19*’ dituliskan bahwa terhitung tanggal 13 Maret 2020, Presiden Trump telah mengumumkan keadaan darurat nasional atas virus corona baru, wabah penyakit menular yang menyebar begitu cepat sehingga akan segera dinyatakan sebagai pandemi global. Namun, di tengah ancaman virus yang mengancam kesehatan masyarakat juga ekonomi negara, muncul sikap ‘*xenophobia*’ dan rasisme dari kalangan elit di Amerika Serikat.

“...President Trump and other prominent Republicans added fuel to the fire, demonizing Chinese and other Asian Americans by referring to COVID-19 as the “Wuhan virus,” “Chinese virus,” and the “Kung Flu.” (Tyler T. Reny dan Matt A. Barreto, 2020)

Tyler T. Reny dan Matt A. Barreto menuliskan bahwa Presiden Trump dan Republikan lainnya bagai menuang bahan bakar ke dalam api, Presiden Trump dan Republikan lainnya mengejek atau menjelek-jelekkkan orang Tiongkok dan juga Asia-Amerika lainnya dengan memberi label *COVID-19* dengan julukan-julukan seperti ‘virus Wuhan’, ‘virus Tiongkok’, dan juga ‘Kung Flu’ (permainan kata, gabungan dari kata ‘Kung Fu’ dan ‘flu’). *The Washington Post* mengeluarkan sebuah artikel yang menunjukkan munculnya sikap ‘*xenophobia*’ dari kalangan elit di Amerika Serikat.

“China is to blame because the culture where people eat bats and snakes and dogs and things like that,” Cornyn told reporters. “These viruses are transmitted from the animal to the people, and that’s why China has been the source of a lot of these viruses like SARS, like MERS, the swine flu, and now the coronavirus.” (The Washington Post, 2020)

Pernyataan diatas disampaikan oleh seorang Senator Republikan Amerika Serikat dari Texas yaitu Senator John Cornyn. Senator Cornyn mengatakan bahwa beliau menyalahkan Tiongkok atas budayanya yang orang-orangnya memakan kelelawar, ular, dan anjing dan hal-hal sejenisnya sehingga menurut Senator Cornyn hal itu menyebabkan berpindahnya virus dari hewan ke manusia dan Senator Cornyn juga mengatakan bahwa Tiongkok juga merupakan sumber munculnya virus-virus sejenis seperti *SARS*, *MERS*, Flu Babi dan sekarang virus corona. Dalam hal ini banyak yang menghujat Senator Cornyn atas sikapnya yang memicu *xenophobia* dan rasisme oleh partai Demokrat dan kritikus di media sosial.

Sikap '*xenophobia*' dan rasisme terhadap etnis Tionghoa atas munculnya pandemi *COVID-19* tidak hanya muncul di negara kepemimpinan Presiden Trump kala itu, namun juga menjalar hingga kawasan Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Indonesia tercatat sebagai negara anggota Asia Tenggara yang memiliki jumlah kasus masyarakat terkonfirmasi *COVID-19* tertinggi dengan 1,2% populasi di Indonesia atau sekitar 3 juta warganya merupakan masyarakat etnis Tionghoa. Kelompok Indonesia-Tionghoa ini jug atidak lepas dari sikap '*xenophobia*' dan rasisme dari kelompok elit dan penduduk lokal.

“Following U.S. President Donald Trump's phrase, many Indonesians on social media use the term "Chinese virus" to refer to COVID-19 and some have been calling for a fatwa, or religious decree, to bar Chinese-Indonesians and Chinese nationals from entering Indonesia.” (Muhammad Zulfikar Rakhmat, 2020)

Seperti yang telah Muhammad Zulfikar Rakhmat tulis dalam artikelnya, bahwa menguatnya sikap '*xenophobia*' dan rasisme di Indonesia terpicu oleh istilah-istilah yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dipergunakan oleh politisi, media, dan juga masyarakat media maya dalam menyebut *COVID-19* sebagai 'virus China' atau 'virus Tiongkok'. Bahkan kelompok-kelompok masyarakat beragama Islam meminta untuk dikeluarkannya fatwa (keputusan agama) guma melarang Indonesia-Tionghoa dan warga negara Tiongkok untuk masuk ke Indonesia. Bahkan ada sekelompok masyarakat Indonesia yang telah melancarkan aksinya. Di Bukittinggi, Sumatera Barat, beberapa ratus warganya mendatangi sebuah hotel tempat sekitar 170 turis Tiongkok menginap dan meminta mereka untuk pergi. Media pun juga terlibat dalam aksi sikap '*xenophobia*' dan rasisme itu, pada akhir bulan Januari 2020, Kompas TV menayangkan suatu segmen dalam sebuah *talk show* yang membuat judul dengan mengaitkan senjata biologis dengan *COVID-19* yang dalam hal ini pembawa acara seakan menggiring opini panelis yang salah satunya merupakan mantan kepala badan intelejen. (Muhammad Zulfikar Rakhmat, 2020)

Hal ini tidak hanya Kompas TV tayangkan melalui media televisi namun juga melalui artikel daring di halaman situsnya. Dalam situsnya, Kompas TV yang menayangkan acara *talk show* dengan menampilkan judul “Senjata Biologis di Balik Virus Korona?”, turut mengundang Mantan Kepala Badan Intelejen Negara Bin Soleman Ponto dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Omni Hospital Pulomas Dirga Sakti Rambe guna memberi pernyataan opini resmi dari orang terpercaya. Pihak Kompas TV membuat judul dan pernyataan tersebut berdasarkan *The Washington Post* yang mengutip pernyataan dari Mantan Perwira Intelejen Israel Dany Shoham yang menyatakan bahwa *COVID-19* sebenarnya merupakan sebuah senjata biologis milik Tiongkok. Dalam artikelnya, Kompas TV juga menekankan pertanyaan

‘apakah virus corona bisa menjadi ancaman keamanan negara.’ (Reny Mardika, 2020)

Tidak hanya di Indonesia, salah satu negara yang dalam lingkup masyarakatnya muncul sikap ‘*xenophobia*’ dan rasisme adalah Filipina. Sebagai tindakan pencegahan, Universitas Adamson di Manila memberlakukan kebijakan bagi semua mahasiswa China untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. (Reuter, 2020)

Protokol Kesehatan Tiongkok

Saat pandemi COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Hubei, Tiongkok segera melakukan *lockdown* dan memperketat kegiatan sosial penduduknya. Dilansir dari situs *cncindonesia.com*, Rehia Sebayang (2021) menuliskan bahwa Tiongkok melakukan *lockdown* di awal kemunculan COVID-19 di 16 kota di sekitar Provinsi Hubei terutama Kota Wuhan yang merupakan kota munculnya kasus pertama COVID-19, kemudian Evelyn Cheng (2021) menuliskan dalam artikelnya di situs *cnc.com* bahwa di akhir tahun 2021 lalu Tiongkok kembali melakukan *lockdown* di Xi’an guna mencegah penyebaran COVID-19 jenis *Omicron*.

Belajar dari pengalaman menghadapi keluarga *coronavirus* sebelumnya, SARS dan MERS, dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 ini tenaga kesehatan menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) yang sangat tertutup guna melindungi garda terdepan yang melawan COVID-19. APD adalah sumber daya penting yang dibutuhkan petugas kesehatan untuk tetap terlindungi dan merasa aman saat bertugas. (UNICEF, 2021)

Sikap cekatan dalam melakukan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 ini berlandaskan dari cepatnya ilmuan-ilmuan Tiongkok dalam mengidentifikasi ciri khusus dari virus SARS-CoV-2 ini sehingga dapat menerapkan protokol-protokol pencegahan penyebaran. Dilansir dari situs *Science*, tim gabungan WHO-China Joint Mission meninjau data yang telah disusun oleh ilmuan-ilmuan Tiongkok dengan melakukan penelitian di lapangan. Berdasarkan penelitian, mereka mempelajari bahwa sekitar 80% orang yang terinfeksi memiliki penyakit ringan hingga sedang, 13,8% memiliki gejala parah, dan 6,1% memiliki gejala gagal napas, syok septik, atau kegagalan organ yang mengancam jiwa. Angka kematian kasus tertinggi terjadi pada orang yang berusia di atas 80 tahun (21,9%), dan juga orang yang memiliki penyakit jantung, diabetes, atau hipertensi. Demam dan batuk kering adalah gejala yang paling umum dan hanya 4,8% orang yang terinfeksi mengalami pilek. Kasus pada anak-anak hanya 2,4% dari total seluruh kasus dan hampir tidak ada yang sakit parah. Untuk kasus ringan dan sedang, butuh waktu rata-rata 2 minggu untuk pulih. (Kupferschmidt, Kai dan Cohen, Jon, 2020)

Kupferschmidt, Kai dan Cohen, Jon, (2020) juga menuliskan bahwa pada 10 Februari, ketika tim gabungan WHO-China Joint Mission mulai bekerja, China melaporkan terdapat 2.478 kasus baru. Dua minggu setelah itu, ketika para ahli asing mengemasi tas mereka, jumlah itu turun menjadi 409 kasus. Dan per 1 Maret 2020, China hanya melaporkan 206 kasus baru, dan jumlah kasus gabungan seluruh dunia memiliki hampir sembilan kali lipat jumlah itu. Belajar dari kesuksesan Tiongkok yang melakukan *lockdown* pada awal era pandemi beberapa negara turut menggalakkan opsi *lockdown* guna melindungi Sumber Daya Manusia-nya. Contohnya El Salvador yang memberlakukan karantina dalam skala nasional terhadap 6,4 juta warga negaranya, menutup instansi Pendidikan selama tiga minggu

serta karantina selama 30 hari di El Salvador bagi penduduk yang baru kembali dari luar negeri (Ruby Mellen, 2020).

Vaksin-vaksin Tiongkok

Selain melakukan *lockdown* dengan cekatan di Provinsi Hubei, Tiongkok dengan sigap mengerahkan semua laboratorium yang dimilikinya untuk melakukan penelitian terhadap *COVID-19* guna meneliti dan mengembangkan vaksin yang layak pakai untuk masyarakatnya. Tiongkok juga melakukan uji klinis di luar negerinya guna melihat layak tidaknya vaksin hasil laboratoriumnya untuk digunakan secara global dengan maksud untuk membantu negara-negara yang belum memiliki vaksin atau tidak memiliki laboratorium yang memadai untuk mengembangkan vaksin *COVID-19*. Tiongkok telah mengembangkan 29 jenis vaksin, 26 diantaranya masih dalam uji klinis tahap II, III dan IV, 6 diantaranya telah terverifikasi layak untuk digunakan dalam negeri, dan 3 vaksin dari 6 vaksin yang terverifikasi nasional tadi telah masuk ke dalam *EUL*. *EUL* adalah sebuah prosedur yang berlandaskan risiko yang bertugas menilai kualitas serta menyusun daftar dari vaksin-vaksin *in vitro*, terapi-terapi dan diagnostik-diagnostik yang belum memiliki lisensi dengan tujuan meningkatkan ketersediaan produk bagi masyarakat yang terimbas dampak darurat kesehatan yang diverifikasi oleh *WHO* sebagai bagian dari *COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access, Akses Global Vaksin COVID-19)*, *COVAX* adalah aliansi dunia yang memiliki tujuan keadilan akses vaksin *COVID-19* yang dipegang oleh 3 badan yaitu Aliansi Vaksin *GAVI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)*, dan *WHO*. (*WHO*, t.t.)

Dunia dikejutkan dengan cepatnya Tiongkok mendistribusikan vaksinnya secara global. Pengiriman vaksin internasional pertama dilakukan oleh perusahaan privat Tiongkok, *Sinovac*. Namun hal itu juga masih menimbulkan pertanyaan terkait efisiensi vaksin yang sangat cepat dikembangkan dan didistribusikan itu. Menurut situs *COVID-19 Vaccine Tracker*, Tiongkok telah memproduksi sekitar 23 jenis vaksin *COVID-19* yang sebagian masih dalam tahap uji klinis dan 6 (enam) vaksin *COVID-19* yang telah terverifikasi untuk digunakan di dalam negeri, dan 3 (tiga) vaksin diantaranya, yaitu *CanSino: Convidecia, Sinopharm BIBP* dan *CoronaVac* telah mendapat pengakuan layak penggunaan dan masuk ke dalam *EUL* oleh *WHO*.

Tabel 1. Daftar Vaksin Produksi Tiongkok

Nama Vaksin	Tahap Uji Klinis	Verifikasi Penggunaan
<i>Zifivax (Anhui Zhifei Longcom)</i>	4	Nasional
<i>Convidecia (CanSino)</i>	4	WHO
<i>KCONVAC (Shenzhen Kangtai Biological Products Co)</i>	4	Nasional
<i>Covilo (Sinopharm-Beijing)</i>	4	WHO
<i>Vero Cells (Sinopharm-Wuhan)</i>	4	Nasional
<i>CoronaVac (Sinovac)</i>	4	WHO
<i>Recombinant (Sf9) (West China Hospital)</i>	3	-
<i>V-01 (Livzon Mabpharm Inc)</i>	3	-
<i>SCTV01C (Sinocelltech)</i>	3	-
<i>CHO Cell (National Vaccine and Serum Institute)</i>	4	-
<i>SCB-2019 (Clover)</i>	3	-
<i>INO-4800 (Inovio)</i>	3	-
<i>mRNA (Walvax)</i>	3	-
<i>LVRNA009 (AIM Vaccine)</i>	3	-
<i>COVID-19 mRNA Vaccine (CanSino Biological Inc)</i>	3	-
<i>Ad5-nCoV-IH (CanSino)</i>	3	-
<i>DeINS1-2019-nCoV-RBD-OPT1 (Wantai)</i>	3	-
<i>Vero Cells (Chinese Academy of Medical Science)</i>	3	-
<i>Omicron COVID-19 Vaccine (China National Biotech Group Company Limited)</i>	3	-
<i>Vero Cell (CZ Strain) (Sinovac)</i>	3	-
<i>Vero Cell (Omicron Variant) (Sinovac)</i>	3	-
<i>202-Cov (Shanghai Zerun Biotechnology, Walvax Biotechnology)</i>	2	-
<i>V-01-351/V-01D (Livzon Pharmaceutical Group Inc)</i>	2	-
<i>SYS6006 (CSPC ZhongQi Pharmaceutical Technology)</i>	2	-
<i>mRNACOVID-19 Vaccine (Stemirna Therapeutics Co LTD)</i>	2	-
<i>LV-SMENP (Shenzhen Geno-Immune Medical Institute)</i>	2	-
<i>CHO Cells (National Vaccine and Serum Institute)</i>	1	-
<i>Ad5-nCov (AMMS)</i>	1	-
<i>Covid-19/aAPC (Shenzhen Geno-Immune Medical Institute)</i>	1	-

Sumber 1: [China – COVID19 Vaccine Tracker \(trackvaccines.org\)](https://trackvaccines.org)
Sumber 2: [WHO – COVID19 Vaccine Tracker \(trackvaccines.org\)](https://trackvaccines.org)

Dilansir dari situs resmi *Yusof Ishak Institute* dalam artikel *China's Vaccine Diplomacy in Southeast Asia - A Mixed Record*, Khairulanwar Zaini (2021) menunjukkan data bahwa per 20 Juni 2020, negara-negara di Kawasan Asia Tenggara telah memesan sekitar 203 juta dosis vaksin buatan Tiongkok yang merupakan 25,6% dari komitmen vaksin komersial Tiongkok. Diantara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia terhitung sebagai pembeli terbesar dengan jumlah pembelian 125 juta dosis vaksin jenis *Sinovac* dan Filipina menempati posisi kedua dengan selisih yang agak jauh yaitu dengan jumlah pembelian 25 juta dosis *Sinovac*. Dalam data yang sama ditunjukkan bahwa Thailand telah memesan vaksin jenis *Sinovac* sebanyak 18,6 juta dosis, Kamboja memesan 14,5 juta dosis vaksin *Sinovac* serta 4 juta dosis vaksin *Sinopharm*, dan Malaysia memesan vaksin jenis *Sinovac* sebanyak 12 juta dosis serta vaksin jenis *CanSino* sebanyak 3,5 dosis. Selain memesan vaksin buatan Tiongkok, Kawasan Asia Tenggara juga ikut menerima donasi vaksin yang didistribusikan Tiongkok secara gratis ke seluruh dunia. (Khairulanwar Zaini, 2021)

Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah vaksin yang didonasikan oleh Tiongkok ke Asia Tenggara ('Donasi'), yang dipesan oleh negara-negara di Asia Tenggara ('Beli'), dan yang telah dikirim secara komersial oleh Tiongkok ke Asia Tenggara ('Kirim').

Tabel 2. Distribusi Vaksin buatan Tiongkok di Asia Tenggara

Negara	Jumlah Vaksin (Juta)		
	Donasi	Beli	Kirim
Brunei Darussalam	0,052	-	-
Cambodia	2,2	18,5	6,5
Indonesia	-	125	94,5
Laos	1,9	-	-
Malaysia	-	15,5	3,7
Myanmar	0,5	-	-
Singapore	-	0,2	0,2
Thailand	1	18,6	5,5
The Philippines	1	25	8
Timor Leste	0,1	-	-
Vietnam	0,5	-	-

Sumber: Zaini, Khairulanwar. (2021). *China's Vaccine Diplomacy in Southeast Asia - A Mixed Record*. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-86-chinas-vaccine-diplomacy-in-southeast-asia-a-mixed-record-by-khairulanwar-zaini/>

Motif Diplomasi Vaksin Tiongkok di Asia Tenggara

Seperti yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, menurut riwayatnya, Tiongkok melakukan pendekatan terhadap ASEAN melalui beberapa kerja sama ekonomi sejak awal hubungan dekatnya di tahun 1991. Namun, saat pandemi COVID-19 muncul, banyak kerja sama yang terhambat dan mengingat citra buruk Tiongkok akibat munculnya sikap 'xenophobia' dan rasisme terhadap Tiongkok di kawasan Asia Tenggara akibat munculnya pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, Hubei. Tiongkok menghadapi pandemi COVID-19 yang begitu serius cekatan dengan memberlakukan *lockdown* di kota munculnya COVID-19, melakukan penelitian guna mengidentifikasi ciri virus dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran COVID-19, serta bekerja sama dengan WHO untuk membentuk tim dalam melawan COVID-19. Kerja sama dengan ASEAN yang dilakukan Tiongkok selama pandemi COVID-19 yang kerja samanya lebih mengarah pada faktor kesehatan, peningkatan imunitas negara, fasilitas alat bantu pemeriksaan dan APD bagi tenaga kesehatan serta distribusi vaksin yang meraih rekor sebagai rekor distribusi vaksin tercepat dan telah diuji klinis hingga telah mendapat pengakuan dari WHO dengan dicantumkannya 3 vaksin buatan Tiongkok ke dalam EUL.

Dalam kerja samanya dengan ASEAN, penulis mengamati bahwa Tiongkok menerapkan *Track One and a Half Diplomacy* karena pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan melawan COVID-19 adalah perwakilan resmi dan difasilitasi serta dimediasi oleh pihak non-politik seperti kerja sama Tiongkok dengan COVAX dan WHO yang difasilitasi oleh laboratorium-laboratorium juga ilmuwan-ilmuwan dalam mengidentifikasi ciri virus dan pengembangan vaksin. Penulis juga mengamati bahwa Tiongkok melakukan pendekatan Diplomasi Publik yaitu

diplomasi yang dilakukan sebuah negara dalam usaha mempengaruhi masyarakat negara lain dengan melakukan *'nation branding'* untuk menarik perhatian masyarakat negara lain dengan tujuan mencapai tujuannya, yang kemudian dikenal dengan Diplomasi Vaksin dengan menggunakan media vaksin sebagai media pendekatannya ke negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Pengamat internasional menangkap adanya perubahan sikap Tiongkok terhadap kerja sama-kerja sama selama pandemi *COVID-19* dibandingkan dengan sebelumnya yang mayoritas terfokus pada kerja sama ekonomi, sedangkan saat ini Tiongkok lebih menguatkan dan memfokuskan pada pencegahan serta penanggulangan dalam melawan *COVID-19*.

Di tengah berlangsungnya *ASEAN-China Special Summit to Commemorate the 30th Anniversary of ASEAN-China Dialogue Relation*, konferensi yang dilaksanakan dalam memperingati 30 tahun hubungan dialog ASEAN dan Tiongkok pada 22 November 2021, Tiongkok berani menyatakan bahwa Tiongkok murni hanya ingin membantu meningkatkan imunitas negara-negara anggota ASEAN melawan pandemi *COVID-19* tanpa ada maksud apapun. Pernyataan Tiongkok ingin pihak rekan kerjanya, yaitu ASEAN, untuk mempercayai dan memahami maksud Tiongkok yang semata-mata murni hanya demi kesehatan seluruh pihak dan ikut berperang melawan *COVID-19* tanpa ada maksud tersembunyi lainnya.

Walaupun dihadapkan dengan sikap *'xenophobia'* dan rasisme pasca menyeruaknya pandemi *COVID-19* terhadap ras Tionghoa, melihat respon Tiongkok dalam menghadapi pandemi *COVID-19* yang begitu serius juga cekatan dengan menerapkan *lockdown* di Kota Wuhan di Provinsi Hubei dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di seluruh penjuru negerinya guna mencegah penyebaran *COVID-19*, pengembangan vaksin dengan cepat, usaha-usaha Tiongkok dalam melawan *COVID-19* serta melihat dari kerja sama Tiongkok dengan ASEAN selama pandemi *COVID-19* yang kerja samanya lebih terfokus kepada faktor kesehatan, peningkatan imunitas negara dan fasilitas alat bantu pemeriksaan bagi tenaga kesehatan juga melakukan distribusi vaksin yang meraih rekor sebagai rekor vaksin tercepat dan telah diuji klinis serta telah mendapat pengakuan dari WHO dengan dicantumkannya 3 vaksin buatan Tiongkok ke dalam *EUL*.

Seperti konsep yang dipakai penulis dalam menganalisa motif Diplomasi Vaksin yang dilakukan Tiongkok pasca dan selama pandemi *COVID-19* di kawasan Asia Tenggara, yaitu konsep *'Nation Branding'*, maka penulis dapat melihat bahwa motif Tiongkok melakukan Diplomasi Vaksin kepada negara-negara di Kawasan Asia Tenggara adalah untuk memperbaiki citranya kembali yang semakin memburuk dengan munculnya sikap *'xenophobia'* dan rasisme yang muncul di masyarakat negara-negara anggota ASEAN pasca *COVID-19* serta membuktikan bahwa Tiongkok sangat kooperatif dalam penyelesaian dan pencegahan pandemi serta menunjukkan bahwa Tiongkok juga dapat dipercaya mampu dan ahli dalam ilmu sains dibuktikan dengan protokol-protokolnya yang menjadi rujukan penanganan pandemi oleh negara-negara lain, penelitiannya dan pengembangan vaksinnya yang terbukti efisien dan aman.

Menurut analisis perbandingan data ekspor dari Tiongkok ke beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara, penulis menyimpulkan analisis sebagai berikut, yaitu ekspor barang ke Brunei Darussalam di tahun 2020 meningkat 28,2% dari tahun 2019 dan di tahun 2021 meningkat 37,2% dari tahun 2020, ekspor barang ke Filipina, ekspor barang ke Indonesia di tahun 2020 menurun 10,2% dari tahun 2019 dan di

tahun 2021 meningkat 47,8% dari tahun 2020, ekspor barang ke Kamboja di tahun 2020 meningkat 24,6% dari tahun 2019 dan di tahun 2021 meningkat 24,5% dari tahun 2020, ekspor barang ke Laos di tahun 2020 menurun 12,3% dari tahun 2019 dan di tahun 2021 meningkat 12% dari tahun 2020, ekspor barang ke Malaysia di tahun 2020 meningkat 7,9% dari tahun 2019 dan di tahun 2021 meningkat 39,7% dari tahun 2020, ekspor barang ke Myanmar di tahun 2020 meningkat 1,9% dari tahun 2019 dan di tahun 2021 menurun 16,3% dari tahun 2020, ekspor barang ke Singapura di tahun 2020 meningkat 5,2% dari tahun 2019 dan di tahun 2021 menurun 4,2% dari tahun 2020, ekspor barang ke Thailand di tahun 2020 meningkat 10,8% dari tahun 2019 dan di tahun 2021 meningkat 37% dari tahun 2020, dan ekspor barang ke Vietnam di tahun 2020 meningkat 16,2% dari tahun 2019 dan di tahun 2021 meningkat 21,3% dari tahun 2020.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas nilai ekspor Tiongkok ke beberapa negara-negara di Kawasan Asia Tenggara tersebut mengalami lonjakan nilai yang cukup nesar di tahun 2021, tahun kedua pandemi *COVID-19*. Hal ini membuktikan bahwa pasca Tiongkok mendistribusikan vaksinnnya secara donasi dan komersial, negara-negara di Kawasan Asia Tenggara kembali membangun kepercayaan kepada Tiongkok. Fakta ini menunjukkan keberhasilan Tiongkok dalam melakukan Diplomasi Vaksin-nya.

Kesimpulan

Tiongkok dan ASEAN terjalin dalam hubungan dialog dan kerja sama berbasis ekonomi yaitu ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), kerjasama ini secara resmi diterapkan dengan ditandatanganinya *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*. Dalam kerjasama ini, Republik Rakyat Tiongkok dan ASEAN menghasilkan beberapa perjanjian kerja sama, antara lain *Trade in Goods Agreement*, *Agreement on Trade in Services*, dan *Investment Agreement*. Pada akhir tahun 2019, muncul sebuah virus yang dalam waktu singkat berubah menjadi skala pandemi dan telah menjadi ancaman bagi seluruh dunia, wabah ini telah memaksa banyak aspek kehidupan dan sistematika dunia berubah pula. Virus ini dinamakan *Coronavirus Disease-19* atau secara singkat disebut dengan *COVID-19*. Pasca munculnya pandemi *COVID-19* ini, Tiongkok menghadapi sikap '*xenophobia*' dan rasisme dari banyak pihak terhadapnya karena kasus pertama *COVID-19* muncul di Kota Wuhan Provinsi Hubei di Tiongkok.

Tiongkok menghadapi pandemi *COVID-19* yang begitu serius cekatan dengan memberlakukan *lockdown* di kota munculnya *COVID-19*, melakukan penelitian guna mengidentifikasi ciri virus dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran *COVID-19*, serta bekerja sama dengan WHO untuk membentuk tim dalam melawan *COVID-19*. Kerja sama dengan ASEAN yang dilakukan Tiongkok selama pandemi *COVID-19* yang kerja samanya lebih mengarah pada faktor kesehatan, peningkatan imunitas negara, fasilitas alat bantu pemeriksaan dan APD bagi tenaga kesehatan serta distribusi vaksin yang meraih rekor sebagai rekor distribusi vaksin tercepat dan telah diuji klinis hingga telah mendapat pengakuan dari WHO dengan dicantumkannya 3 vaksin buatan Tiongkok ke dalam EUL. Tiongkok menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dalam penyelesaian dan pencegahan pandemi serta menunjukkan bahwa Tiongkok juga dapat dipercaya mampu dan ahli dalam ilmu sains dibuktikan dengan protokol-protokolnya yang

menjadi rujukan penanganan pandemi oleh negara-negara lain, penelitian dan pengembangan vaksinnnya yang terbukti efisien dan aman.

Lalu melihat data ekspor Tiongkok yang mayoritas nilai ekspor Tiongkok ke beberapa negara-negara di Kawasan Asia Tenggara menunjukkan lonjakan nilai yang cukup besar tahun kedua pandemi telah membuktikan bahwa pasca Tiongkok mendistribusikan vaksinnnya secara donasi dan komersial, negara-negara di Kawasan Asia Tenggara kembali membangun kepercayaan kepada Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa Diplomasi Vaksi yang dilakukan Tiongkok berhasil mengembalikan citranya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa argumen utama penulis sesuai dengan hasil pengamatan dan analisis lebih dalam dengan menggunakan Teori Diplomasi dan Konsep *Nation Branding* bahwa Tiongkok menerapkan *Track One and a Half Diplomacy* dengan vaksin *COVID-19* sebagai media pendekatannya dalam kerja sama dan hubungannya dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara guna menerapkan *nation branding* dengan tujuan meningkatkan citra Tiongkok yang memburuk pasca munculnya pandemi *COVID-19* akibat timbulnya sikap 'xenophobia' dan rasisme terhadap RRT juga keturunan etnis Tionghoa yang tinggal di negara-negara anggota ASEAN itu.

Daftar Pustaka

- Anholt, Simon. (2007). *Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities, Regions*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- ASEAN. (t.t.). *ASEAN-China Economic Relation*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/Overview-of-ASEAN-China-Relations-22-Apr-2020-00000002.pdf>
- ASEAN. (t.t.). *Overview of ASEAN-China Dialogue Relations*. <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/asean-china-economic-relation/>
- ASEAN. (t.t.). *Priority Areas of Cooperation*. <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/asean-china-economic-relation/priority-areas-of-cooperation/>
- Asmarani, Nora Galuh Candra. (2020). *Apa itu Rules of Origin?*. DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-rules-of-origin-25643>
- Bailey, K. D. 2008. *Methods of Social Research* (ed.ke-4). Free Press.
- Barston, R. P. (2013). *Modern Diplomacy* (ed.ke-4). New York, USA: Routledge.
- Cheng, Evelyn. (2021). *Major Chinese City Locks Down to Control COVID Outbreak*. <https://www.cnbc.com/2021/12/23/major-chinese-city-locks-down-to-control-covid-outbreak.html>
- China coronavirus: Lockdown measures rise across Hubei province*. (2020). British Broadcasting Corporation: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51217455>
- COVID-19 Vaccine Tracker. (2022). *China*. <https://covid19.trackvaccines.org/country/china/>
- COVID-19 Vaccine Tracker. (2022). *World Health Organization (WHO)*. <https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/>
- Dinnie, Keith. (2016). *Nation Branding : Concept, Issues, Practice* (ed.ke-2). New York, USA: Routledge.

- Diplomasi*.(t.t.). Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id/diplomasi>
- Dugis, Vinsensio. (2016) *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya : Cakra Studi Global Strategis (CSGS)
- FAQ Vaksinasi COVID-19.(t.t.). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID_call_center.pdf
- Feldmann, M. (2017). *Twenty Years "One Country, Two Systems" in Hong Kong: A Reason to Celebrate?* Verfassungsblog: <https://verfassungsblog.de/twenty-years-one-country-two-systems-in-hong-kong-a-reason-to-celebrate/#:~:text=When%20in%20preparation%20for%20the,be%20a%20stroke%20of%20genius>
- Frederick, Howard H.. (1993). *Global Communication and International Relations*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Freeman, C. W. dan Marks, Sally (2020). *diplomacy*. Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/diplomacy>
- Gilboa, Eytan. (2008). Searching for a Theory of Public Diplomacy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616. 55–75. DOI: 10.1177/0002716207312142
- Ikande, M. (2017). *Types of diplomacy in international relations*. Legit: <https://www.legit.ng/1131145-aristotypes-diplomacy-international-relations.html>
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kraska, J. (2020). *Tiongkok is Legally Responsible for COVID-19 Damage and Claim could be in the Trillions*. War on the Rocks: <https://warontherocks.com/2020/03/Tiongkok-is-legally-responsible-for-covid-19-damage-and-claims-could-be-in-the-trillions/>
- Kupferschmidt, Kai dan Cohen, Jon. (2020). *China's aggressive measures have slowed the coronavirus. They may not work in other countries*. Science: <https://www.science.org/content/article/china-s-aggressive-measures-have-slowed-coronavirus-they-may-not-work-other-countries?cookieSet=1>
- Li, YD., Chi, WY., Su, JH, Ferrall, L., Hung, CF., Wu, T.-C. (2020). Coronavirus vaccine development: from SARS and MERS to COVID-19. *Journal of Biomedical Science*, 27(104). DOI: 10.1186/s12929-020-00695-2
- Mardika, Reny. (2020). *Virus Corona, Bentuk Senjata Biologis Tiongkok Untuk Perang?*. Kompas TV: <https://www.kompas.tv/article/64378/virus-corona-bentuk-senjata-biologis-tiongkok-untuk-perang?page=all>
- Malone, Gifford. (1985). *Managing Public Diplomacy*. Washington Quarterly 8 (3): 199-213.
- Mapendere, Jeffrey. (2021). Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks. *COPOJ – Culture of Peace Online Journal*, 2(1). 66-81. ISSN 1715-538X
- McGlinchey, Stephen. (2017). *Diplomacy*. Dalam Stephen McGlinchey (Ed.), *International Relations* (20-31). Bristol: E-International Relations.
- Mellen, Ruby. (2020). *El Salvador's president says the country has no coronavirus cases, declares a national quarantine*. The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/el-salvador-nayib-

[bukele-coronavirus-quarantine/2020/03/12/d920e9a4-6404-11ea-8a8e-5c5336b32760_story.html](https://www.reuters.com/article/us-china-health-philippines-idUSKBN1ZX21L)

- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nye, J. S. (1990). *Soft Power. Foreign Policy*, (80). 153. DOI: 10.2307/1148580
- Philippines' Duterte says xenophobia against Chinese must stop*. (2015). Reuter: <https://www.reuters.com/article/us-china-health-philippines-idUSKBN1ZX21L>
- Prasetia, Arus Reka. (2015). *Nation Branding: Komunikasi (Kenegaraan) atau Komunikasi Pemasaran?*. DOI: 10.13140/RG.2.1.3692.2960.
- Rakhmat, Muhammad Zulfikar, (2020). *Indonesia must tackle corona-driven growth in anti-Chinese xenophobia*. Nikkei Asia: <https://asia.nikkei.com/Opinion/Indonesia-must-tackle-corona-driven-growth-in-anti-Chinese-xenophobia>
- Reny, Tyler T. dan Barreto, Matt A. (2022). *Xenophobia in the time of pandemic: othering, anti-Asian attitudes, and COVID-19, Politics, Groups, and Identities*, 10(2). 209-232. DOI: 10.1080/21565503.2020.1769693
- Sebayang, Rehia. (2020). *Termasuk China, Ini 11 Negara yang Lockdown Negara Covid-19*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200316115516-4-145119/termasuk-china-ini-11-negara-yang-lockdown-negara-covid-19>
- Sejarah Infeksi Flu Burung pada Manusia*. (2021). Kompas: <https://amp.kompas.com/global/read/2021/06/02/111500670/sejarah-infeksi-flu-burung-pada-manusia>
- Shepperd, Katie. (2020). *John Cornyn criticized Chinese for eating snakes. He forgot about the rattlesnake roundups back in Texas*. The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/nation/2020/03/19/coronavirus-china-cornyn-blame/>
- Solis-Moreira, J. (2021). *How did we develop COVID-19 vaccine so quickly?* Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-did-we-develop-a-covid-19-vaccine-so-quickly#Other-coronaviruses>
- Soni, Parul. (2019). *Nation Branding: How to Build an Effective Location Brand Identity*. Brand Finance: <https://brandfinance.com/insights/nation-branding#:~:text=Nation%20branding%20is%20how%20a,concepts%20and%20techniques%20to%20countries>
- Sugiyono. (2014). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Szumer, Zacharias. (2020). *Coronavirus spreads anti-Chinese feeling in Southeast Asia, but the prejudice goes back centuries*. South China Morning Post: <https://www.scmp.com/lifestyle/article/3081930/coronavirus-spreads-anti-chinese-feeling-southeast-asia-prejudice-goes>
- The History of the Word 'Xenophobia'*. (t.t.). Merriam Webster: <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/a-short-history-of-xenophobia>
- Trading Economics. (2021) *China Exports by Country*. <https://tradingeconomics.com/china/exports-by-country>
- Triangulasi pada penelitian kualitatif*. (2013). Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: <https://pddi.lipi.go.id/triangulasi-pada-penelitian-kualitatif/>
- Tuch, Hans. (1990). *Communicating with The World: US Public Diplomacy*

- Overseas*. New York: St. Martin's.
- Undiagnosed Pneumonia - Tiongkok (Hubei): Request for Information*. (2019). Promed Mail: <https://promedmail.org/promed-post/?id=6864153>
- UNICEF. (2021). *Three reasons why personal protective equipment (PPE) supply remains critical*. <https://www.unicef.org/supply/stories/three-reasons-why-personal-protective-equipment-ppe-supply-remains-critical>
- Wilson, Ernest J. (2008). Hard Power, Soft Power, Smart Power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1). 110–124. DOI: 10.1177/0002716207312618
- WITS. (2019). *China Exports*. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2019/TradeFlow/Export>
- WITS. (2020). *China Exports*. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2020/TradeFlow/Export>
- World Health Organisation. (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID19*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- Wortzel, Larry M. (1999). *Dictionary of Contemporary Chinese Military History*. London: Greenwood Press. https://books.google.co.id/books?id=rfu-hR8msh4C&pg=PA180&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Wu, Y., Chen, C., Chan, Y. (2020). The outbreak of COVID-19: An overview. *Journal of the Chinese Medical Association* 83(3). 217-220. DOI: 10.1097/JCMA.0000000000000270
- Zaini, Khairulanwar. (2021). *China's Vaccine Diplomacy in Southeast Asia - A Mixed Record*. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-86-chinas-vaccine-diplomacy-in-southeast-asia-a-mixed-record-by-khairulanwar-zaini/>